

Ridwan Kamil Minta Pendukung Rizieq Shihab tak Datangi Polres

Bandung (IM) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta massa Front Pembela Islam (FPI) pendukung Rizieq Shihab untuk menahan diri dengan tidak mendatangi kantor kepolisian resor (polres) di setiap wilayah.

"Kita ikuti saja karena itu kewenangannya sudah ditarik ke Polri pusat dan sebagainya, kita ikuti, dan yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proposional," kata Ridwan Kamil di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu.

Selain itu, ia mengimbau apabila ada pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya agar disampaikan dengan mengedepankan dialog guna menjaga kondusifitas di Jawa Barat.

Kemarin, ada sekitar lima kantor polisi atau polres yang didatangi massa pendukung Rizieq Shihab.

Di antaranya Polres Ciamis, Polres Tasikmalaya, Polresta Bandung, Polres Cianjur, dan Polres Garut.

"Saya imbau kita mengedepankan dialog penyampaian aspirasi secara damai, maka saya imbau seluruh warga untuk menahan diri, serahkan semua ke proses hukum," katanya.

Mantan Wali Kota Bandung itu mendatangi Gedung Ditreskrim Polda Jawa Barat dalam rangka memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus kerumunan Rizieq Shihab pada Jumat (13/11) lalu, di Megamendung, Bogor.

Gubernur Jawa Barat itu hadir ke Gedung Ditreskrim Polda Jawa Barat pada pukul 09.11 WIB dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB. Selain Ridwan Kamil, pada saat yang sama polisi juga memeriksa dua orang yang terkait kasus itu yakni Muchsin Alatas dan Asep Agus Sofyan. ● pur

Kasus Covid-19 Tinggi, Kadinkes Bandung Diganti

BANDUNG (IM) - Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengganti Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rita Verita ke dr Ahyani Raksanegara di saat kasus penyebaran Covid-19 tinggi. Ahyani Raksanegara sebelumnya merupakan Kepala Bappelitbang.

Pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung merilis hingga Selasa (15/12) jumlah kasus kumulatif Covid-19 mencapai 4.743, kasus positif aktif 792, kasus sembuh 3.813 dan kasus sembuh 138. Kasus harian positif Covid-19 di Kota Bandung masih berada di angka puluhan.

Oded mengungkapkan rotasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung dilakukan untuk penyegaran organisasi. Khusus untuk Kadinkes, ia membantah jika rotasi dilakukan akibat kasus penyebaran Covid-19 yang tinggi dan level kewaspadaan di zona merah.

"Alhamdulillah ada pelantikan untuk tujuannya penyegaran organisasi tetap segar, mudah-mudahan harapan mang Oded bisa lari lagi (program)," ujarnya usai melantik sejumlah pejabat eselon IIB dan III, Rabu (16/12).

Ia berharap para kepala dinas yang baru dapat mengelola instansi yang dipimpin dengan baik dan memaksimalkan anggaran

yang ada untuk pembangunan. Khusus pergantian kepala Dinas Kesehatan, ia membantah akibat kasus yang tinggi.

Kepala Diskominfo baru, Yayan Ahmad Brilyana yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengatakan sebanyak 89 orang dilantik pada hari ini, Rabu (16/12) di antaranya pejabat yang dirotasi eselon II B 7 orang dan eselon 3, 6 orang. Ia menyebutkan saat ini jumlah pegawai yang pensiun mencapai 1.204 orang.

"1.204 formasi (pensiun), 60 persen guru dan tenaga kesehatan," ujarnya. Ia melanjutkan, melalui e-formasi pihaknya sudah mengajukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kepada Kemenpan RB sebanyak 2.700 namun belum dipastikan disetujui semua.

Mantan Kepala Dinkes, Rita Verita dirotasi menjadi Kepala Dinas KB, Kepala Bappelitbang dijabat Anton Sunarwibowo, Kepala Disdukcapil yang kosong dijabat Tatang Muhtar.

Bambang Suhari yang menjabat Kepala Bagian Hukum menjadi Kepala Distaru dan Sigit Iskandar menjadi Sekretaris Dispora. ● pur

8|Nusantara



IDN/ANTARA

PENGHORMATAN TERAKHIR TENAGA KESEHATAN POSITIF COVID-19

Sejumlah tenaga kesehatan menaburkan bunga saat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah tenaga kesehatan terpapar Covid-19 Septiany Kramatsari yang berada di dalam mobil jenazah di kantor Palang Merah Indonesia, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (16/12). Pelepasan dan penghormatan terakhir tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama profesi saat rekan mereka wafat dalam tugas.

Pemkot Bogor Jadikan Danau Sumber Baru Penyediaan Air Bersih

Air di danau Bogor Raya berpotensi memiliki 400 liter per detik. Saat ini kondisi danau sedimentasi tinggi dan sudah puluhan tahun tidak diurus. Nanti setelah direvitalisasi, baru danau diserahkan menjadi PSU ke Pemkot Bogor.

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan, memanfaatkan danau sebagai sumber baru penyediaan air bersih. Danau tersebut berada di kawasan Klub Bogor Raya, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, pemanfaatan danau untuk kebutuhan air bersih merupakan peningkatan layanan kepada masyarakat. Pada aturan baru, ada perubahan rasio perhitungan layanan air bersih menjadi satu banding lima dan perubahan capaian layanan saat ini baru 76%.

"Artinya harus mencari sumber air baku baru, baik air permukaan ataupun air tanah untuk menambah persentase air. Salah satu sumber air baku yang akan dikelola adalah yang di Danau Bogor Raya dan merupakan sumber air berasal dari air sungai Cihelut. Nanti PT SEG yang akan merevitalisasi danau, kemudian diserahkan ke Pemkot Bogor agar nanti bisa dimanfaatkan oleh Perumda Tirta Pakuan. Jadi pemanfaatan air danau ini untuk memenuhi jumlah layanan air," kata Dedie, Rabu (16/12).

Dedie melanjutkan, air di danau Bogor Raya berpotensi memiliki 400 liter per

detik. Saat ini kondisi danau sedimentasi tinggi dan sudah puluhan tahun tidak diurus. Nanti setelah direvitalisasi, baru danau diserahkan menjadi PSU ke Pemkot Bogor.

"Penyerahan PSU itu kondisi danau harus keadaan baik, jadi harus direvitalisasi dulu. Nanti danau pasti diserahkan sebagai PSU, tapi berdasarkan aturan Perda harus dalam keadaan kondisi baik. Ditargetkan revitalisasi selama satu tahun," ungkap Dedie.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan mengatakan, pihaknya sudah menghitung kebutuhan pengelolaan air bersih di danau Bogor Raya. Jadi, sumber air dari danau itu untuk mengcover kebutuhan pembangunan di Bogor Heritage Ecopark sekitar 400 liter perdetik.

"Ini peluang bagi Perumda Tirta Pakuan dan peluang bagi masyarakat Kota Bogor," ucap Indira.

Selain itu, penghitungan kasar untuk kebutuhan anggaran tersebut sekitar Rp 40

miliar ditambah pembangunan reservoir dan jaringan baru. Jadi, total sekitar Rp 100 miliar untuk pembangunannya.

"Sudah mulai mendesain dan menghitung, semua dijalankan sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

Terkait rencana tersebut, Direktur Operasional PT SEG, Wahyu Kurniawan sebagai pengembang sangat menyambut baik rencana pengelolaan danau Bogor Raya menjadi sumber baru kebutuhan air

bersih.

"Kami akan melakukan pengelolaan air danau menjadi air baku air minum.

Dengan adanya pengembangan kawasan Bogor Heritage Ecopark, kami berkomitmen untuk mengembalikan fungsi dari

Danau Bogor Raya sebagai sumber air minum, pengendalian banjir dan wisata air, serta rencana akan diserahkan kepada Pemkot Bogor," tutur Wahyu. ● gto

JIKA KABUPATEN BOGOR DIMEKARKAN

KPU Kab. Bogor Buat Skenario Pemilihan Legislatif

BOGOR (IM) - Jika terjadi pemekaran Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor akan membuat skenario pengisian calon legislatif.

Hal ini sejalan dengan rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang sudah di depan mata dengan rencana penyerahan dokumen persetujuan bersama gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat diwakili Kementerian Dalam Negeri, Selasa (15/12) kemarin.

Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Bogor sudah bersiap diri untuk membuat skenario pengisian calon legislatif di daerah otonomi baru. Termasuk menentukan komposisi dapil, kata anggota KPU Kabupaten Bogor divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Herry Setiawan kepada wartawan, kemarin.

"KPU Kabupaten Bogor sedang melakukan pematangan berbagai skenario untuk mengisi kursi DPRD di daerah otonom baru termasuk distrik magnitude atau pembagian dapil DPRD kabupaten Bogor dan kabupaten Bogor Barat," ujar Herry.

Dalam skenario itu nantinya

DPRD Kabupaten Bogor Barat akan diisi 50 kursi dari Dapil 4 dan 5. Jika kurang akan diisi oleh caleg perolehan suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya sampai memenuhi kuota 50 kursi.

"Sementara itu untuk kursi DPRD kabupaten Bogor induk yang akan ditinggalkan anggota legislatif dari dapil 4 dan 5 akan diisi oleh caleg DPRD suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya dari dapil 1, 2, 3 dan 6 sampai terpenuhi kuota 55 kursi," imbuh Herry.

Terkait dengan pemekaran Bogor Barat, KPU tetap memantau perkembangan aktual yang terjadi setelah penyerahan dokumen persetujuan bersama gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat yang masih berproses hingga tiga tahun ke depan.

"Terkait pemekaran Bogor Barat sendiri, KPU tetap memantau apapun perkembangan yang terjadi antara pemkab Bogor, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

Kaitan KPU hanya pada persiapan skenario jika segera dibentuk DPRD persiapan di Bogor Barat," tandasnya. ● gto

Longsor Terjang Akses Jalan ke Geopark Ciletuh Sukabumi

SUKABUMI (IM) - Bencana longsor menerjang Puncak Gebang, Desa Ginimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi Selasa (15/12) malam. Dampak longsor tersebut mengakibatkan akses jalan ke kawasan Geopark Ciletuh yakni Loji-Palangpang tertutup.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, bencana tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 01.00 WIB.

"Hujan deras pada Selasa malam mengakibatkan terjadi longsor tanah di beberapa titik," ujar Koordinator Puskalops BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna kepada wartawan Rabu (16/12).

Longsor tanah tersebut dipicu oleh hujan deras sepanjang malam. Akibatnya, ada beberapa titik longsor tanah yang menutupi akses jalan Loji - Palangpang tertutup total.

Langkah penanganan kata Daeng yakni pada Rabu petugas penanggulangan bencana (PB) Kecamatan Ciemas mendapat informasi Muspika melalui WhatsApp. Selanjutnya petugas penanggulangan bencana kecamatan (P2BK) Ciemas melakukan kordinasi langsung dengan assessment ke lokasi. Upaya ini dilakukan bersama

dengan Forkompimcam yakni Camat, Danramil, Kapolsek, Kasi Sosbud, Kasi Trantib Ciemas. Selain itu dengan melibatkan Satpol PP Ciemas, Tagana Ciemas, Babinsa Desa Ginimukti, dan Bhabinkamtibmas Desa Ginimukti.

Menurut Daeng, petugas berupaya mengevaluasi material longsor yang menutupi jalan dengan berbagai peralatan dan bantuan alat berat. Dengan begitu, akses jalan bisa segera dibuka kembali.

Daeng mengungkapkan, intensitas hujan yang tinggi rawan menyebabkan bencana alam. Warga harus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya korban jiwa maupun kerugian materiil.

Sebelumnya bencana alam juga melanda Sukabumi pada Selasa 8 Desember 2020 lalu berupa angin kencang dan longsor.

"Pada waktu itu ada 22 titik bencana yang tersebar di sejumlah kecamatan," ujar Daeng.

Di antaranya bencana angin kencang di Kecamatan Gegerbitung, Purabaya, Jampang Tengah, Sagaranten, Gunungguruh, Sukabumi, Simpnan, Caringin, Nagrak, Cikembar, dan Palabuhanratu.

Sementara longsor di Kecamatan Jampang Tengah, Purabaya, dan Simpnan. ● pur



IDN/ANTARA

RAPID TEST GRATIS UNTUK PEREMPUAN

Petugas medis melakukan rapid test kepada anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Halaman Setda Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (16/12). Dalam rangka memperingati hari ibu ke-92 TP-PKK Provinsi Jabar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menggelar rapid test gratis bagi kaum perempuan untuk mencegah penularan Covid-19.

Gubernur Jabar Sudah Serahkan Berkas DOB Bogor Barat

BOGOR (IM) - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyerahkan berkas dokumen calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat kepada Pemerintah Pusat di Ponpes Asacufurrohmi Sulaimaniyah Jasinga Kabupaten Bogor, Selasa (15/12).

Kemarin telah dokumen calon DOB diserahkan ke Pemerintah pusat, diharapkan pada bulan Maret 2021, ada jawaban dari pemerintah pusat, apakah moratorium bisa dicabut atau tidak.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menuturkan pihak yang sudah menyerahkan usulan untuk calon DOB adalah Kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus dari proses administrasi dan kapasitas.

Dari mulai persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat. Sekarang dokumennya di pemerintah pusat.

"Ada harapan di bulan Maret 2021, menghasilkan sebuah keputusan yang jelas. Bagaimana DOB baru bisa disetujui dan diresmikan," ujarnya.

Menurut Kang Emil sapaan akrabnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung adanya DOB. Seharusnya ada 40 daerah di Jawa Barat tetapi sekarang hanya ada 27 daerah.

Pihaknya menyampaikan ke pemerintah pusat, daerah yang paling realistis dan siaplah yang

bisa dilakukan pemekaran. "Penyerahan dokumen DOB Kabupaten Bogor Barat ke Pemerintah Pusat di

Ponpes Asacufurrohmi Sulaimaniyah Jasinga diharapkan bisa melahirkan kemalalahan dan kemudahan bagi masyarakat," pintanya.

Ia sangat mendukung adanya DOB, sebab sesuai dengan visi misi sebagian Gubernur yakni memekarkan daerah-daerah yang ada di Jabar.

"Saya akan mengawal sesuai aturan. Minimal ada tiga dulu yang akan dilakukan DOB. Antrean yang mengusulkan DOB sampai ada 20 daerah, namun belum siap baru ada tiga daerah, salah satunya Kabupaten Bogor Barat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin mengaku menyiapkan DOB Kabupaten Bogor Barat dari Kabupaten Bogor sudah sangat siap, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Kesiapan tersebut di antaranya dari mulai administrasi, batas wilayah, aset, prasarana dan anggaran.

"DPRD Kabupaten Bogor menyetujui anggaran operasional ketika ditetapkan sebagai calon persiapan. Sedangkan penganggaran ASN, tetap masih di induk," tukasnya. ● gto

Pemkot Bogor Siapkan RS Darurat Covid-19

BOGOR (IM) - Menipisnya ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 di Kota Bogor membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera mengambil langkah untuk membuat rumah sakit darurat. Saat ini, ada dua alternatif yang diputuskan untuk menjadi rumah sakit darurat Covid-19 Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, dua alternatif tersebut adalah lapangan RS Marzoeiki Mahdi dan lapangan soft ball GOR Pajajaran. "Kita sedang mengajukan lapangan Marzoeiki Mahdi untuk dijadikan rumah sakit darurat Covid-19 Kota Bogor. Alternatif yang kedua, adalah lapangan soft ball atau lapangan bola luar GOR Pajajaran," kata Dedie.

Dipilihnya dua alternatif lapangan Marzoeiki Mahdi dan lapangan soft ball GOR Pajajaran, dijelaskan Dedie, antara lain karena dua lokasi tersebut cukup memenuhi luas lahan yang diperlukan. Yakni sekitar 4.000-5.000 meter persegi. "Jadi lokasi ini cukup memenuhi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Dedie, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan rumah sakit darurat. Pertama, yakni kedekatan dengan fasilitas

kesehatan. Sebab, mobilisasi para tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat harus diperhatikan.

Kedua, rumah sakit darurat tidak berdiri sendiri. Tapi menempel pada satuan tugas atau unit kerja fasilitas kesehatan. "Nah tinggal sekarang kita tinggal berkoordinasi dengan kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan, yang sudah memiliki pengalaman.

Bukan mereka yang belum pernah melaksanakan kegiatan pembangunan rumah sakit darurat," jelasnya.

Dedie mengatakan, nantinya Pemkot Bogor akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Juga akan dikawal oleh inspektoral dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rumah sakit darurat akan mulai dibangun bulan ini, meski penyelesaiannya membutuhkan dua hingga tiga bulan. "Kita akan mulai secepatnya.

Kan kita itung dan izin lokasi dulu. Penyelesaiannya kita minta juga secepatnya karena kondisinya sudah sangat darurat," ujar Dedie.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Ilham Chaidir menerangkan, fasilitas yang akan dimiliki oleh

rumah sakit darurat ini nantinya berupa 40 kamar karantina dan sepuluh kamar bertekanan rendah.

"Jadi memang ada spesifikasi seperti kamar tekanan negatif, kemudian tempat isolasi yang berkapasitas 40 untuk karantina, 10 untuk tekanan negatif," ujarnya.

Senada dengan Dedie, Ilham menambahkan, syarat lokasi yang digunakan menjadi rumah sakit darurat, antara lain memiliki luas tanah minimal 4.000 meter persegi.

Nantinya, bentuk rumah sakit darurat yang akan dibangun merupakan bangunan permanen.

"Nanti akan seperti rumah sakit, jadi bangunan permanen bukan semi permanen," tuturnya. Berdasarakan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, penambahan kasus positif di Kota Bogor pada Selasa (15/12) yakni sebanyak 72 orang.

Pasien yang dinyatakan sembuh 65 kasus dan tiga orang dinyatakan meninggal.

"Total kasus positif Covid-19 di Kota Bogor ada 815 kasus aktif, 3326 kasus dinyatakan sembuh dan 117 orang dinyatakan meninggal," kata Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo. ● gto



IDN/ANTARA

PEMBONGKARAN TEMPAT KARAOKE ILEGAL DI SEMARANG

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang berjaga saat pembongkaran sejumlah tempat karaoke ilegal di kawasan Relokasi Pasar Johar, Kelurahan Sambirejo, Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (16/12). Sebanyak 18 tempat karaoke dan sejumlah bangunan ilegal yang berdiri di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah itu dibongkar Satpol PP karena melanggar ijin pembangunan.